

Pendidikan Nasional, Kesempatan Kerja dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Oleh : E. Zainal Abidin



E. Zaenal Abidin, SH.MS.MPA, lahir di Majalengka tanggal 4 April 1946. Jabatan Dosen Fakultas Hukum Ull Yogyakarta, Direktur LPPM Ull (1980) dan kini Dekan Fak. Hukum Ull. Pendidikan, lulus Sarjana Hukum Ull tahun 1973, Sarjana Utama Bidang Kependudukan (1989) Master of Public Administration University of Southern California, Los Angeles, 1989. Kegiatan Ilmiah Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Seminar Penelitian terutama dalam bidang, Kemasyarakatan, Pembangunan dan Hukum.

Permasalahan

Pendidikan Nasional dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan menyangkut segenap usaha untuk meningkatkan produktivitas seluruh sumber daya manusia yaitu tersedianya tenaga kerja yang terdidik dan terampil sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, masih terdapat kesenjangan antara angkatan kerja, tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Kesenjangan tersebut terjadi sebagai akibat pilihan teknologi yang berorientasi padat modal di satu pihak dan lemahnya lembaga pendidikan dalam mengejar ketinggalan tuntutan keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat industri.

Diperlukan suatu perencanaan ketenaga kerjaan yang sinkron dengan perencanaan pendidikan dan atau sebaliknya sinkronisasi antara perencanaan pendidikan dengan perencanaan ketenaga kerjaan.

Pembahasan

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah mereka yang telah mencapai usia kerja, telah bekerja, dan mereka yang secara aktif mencari pekerjaan. Dengan mengetahui keadaan angkatan kerja dapat diketahui kesempatan kerja apa dan berapa besar kesempatan kerja yang diperlukan untuk menampung keseluruhan angkatan kerja yang tersedia.

Jumlah angkatan kerja/tenaga kerja banyak ditentukan oleh variabel kependudukan (jenis kelamin, usia) sedang kualitas atau mutu tenaga kerja terutama dipengaruhi oleh kondisi dan kebijaksanaan

kependidikan. Diperkirakan selama Repelita V jumlah angkatan kerja meningkat dari 71 juta pada tahun 1988 menjadi sekitar 82 juta pada tahun 1993. Hal tersebut mengandung arti terdapat peningkatan sebanyak 11 juta orang atau sebanyak 2.229.500 orang pertahun (2,96%). Dari sejumlah itu, sebagaian (50,19%) memiliki pendidikan rendah yaitu sekolah dasar (SD). Kondisi angkatan kerja dengan pendidikan rendah akan menghasilkan produktivitas yang rendah dengan kualitas yang rendah pula. Pada tabel 1,2 dapat dilihat proyeksi pertumbuhan dan penambahan angkatan kerja serta perkiraan tambahan angkatan kerja menurut pendidikan selama periode tahun 1988 - 1993

TABEL : 1 Analisa Tambahan Angkatan Kerja dan Kesempatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan (1988 - 1993) Dalam Ribuan

| No. | Tingkat/Jenis Pendidikan | Tambahan Angkatan Kerja | Tambahan Sempatan Kerja | % | Keseimbangan |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 1. | Tidak Pernah Sekolah | | 2.372 | 21,65 | 2.372 |
| 2. | Tidak Tamat Sekolah Dasar | 1.598.408 | 3.762 | 34,34 | 2.163.592 |
| 3. | Sekolah Dasar | 3.096.020 | 3.021 | 27,58 | 975.020 |
| 4. | SMTP Umum | 1.446.815 | 620 | 5,66 | 826.815 |
| 5. | SMTP Kejuruan | 101.433 | 155 | 1,42 | 53.567 |
| 6. | SMTA Umum | 795.860 | 388 | 3,54 | 407.860 |
| 7. | SMTA Kejuruan | 1.514.809 | 494 | 4,51 | 1.020.809 |
| 8. | Perguruan Tinggi Program SO | 372.930 | 84 | 0,77 | 488.930 |
| 9. | Perguruan Tinggi Program S1 | 1.120.223 | 58 | 0,53 | 1.062.223 |
| J U M L A H | | 11.146.498 | 10.954 | 100 | 192.498 |

Catatan : Bandingkanlah dengan : Bappenas/Depdikbud/Depnaker/BPS (1989) Hal. 36 tahun 1991 (revisi)

Tabel : 2 Perkiraan Tambahan Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Repelita V (1988 - 1993)

| No. | Tingkat/Jenis Pendidikan | Kejuruan Pendidikan Formal | | Tambahan Angkatan Kerja |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-------------------------|
| | | Jumlah | % | |
| 1. | Tidak Pernah Sekolah | | | |
| 2. | Tidak Tamat Sekolah Dasar | 2.050,2 | 14,34 | 1.598.408 |
| 3. | Sekolah Dasar (SD) | 3.124,0 | 35,85 | 3.096.020 |
| 4. | SMTP Umum | 1.855,2 | 12,90 | 1.446.815 |
| 5. | SMTP Kejuruan | 130,4 | 0,91 | 101.433 |
| 6. | SMTA Umum | 1.020,4 | 7,14 | 795.860 |
| 7. | SMTA Kejuruan | 1.941,9 | 13,59 | 1.514.809 |
| 8. | Perguruan Tinggi Program SO | 355,4 | 3,14 | 372.930 |
| 9. | Perguruan Tinggi Program S1 | 1.437,1 | 10,05 | 1.120.223 |
| J U M L A H | | 14.294,6 | 100 | 11.146.498 |

Sumber : Bappenas/Depdikbud/Depnaker/BPS (1989) hal. 36

2. Kesempatan Kerja

Pendekatan yang mengutamakan sisi permintaan (model Keynes) di mana modal merupakan penggerak pembangunan berpendapat bahwa kesempatan kerja tercipta karena adanya produksi barang dan jasa. Semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan semakin banyak pula kesempatan kerja diciptakan dengan catatan bila teknologi yang digunakan tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu untuk menumbuhkan perluasan kesempatan kerja harus ditujukan pada mendirikan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan barang yang kemudian akan menimbulkan permintaan terhadap masukan (input) produksi yaitu antara lain tenaga kerja. Akan tetapi untuk negara kita dimana terdapat ketidak seimbangan distribusi penduduk serta tenaga kerja berlebih pendekatan tersebut dipandang tidak tepat. Dalam pilihan teknologi cenderung memilih teknologi padat modal (capital intensive) sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terpakai. Pengangguran semakin bertambah setiap tahun di samping terdapatnya pengangguran terselubung (disguised unemployment) yaitu mereka yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan serta ketrampilan yang dimiliki (underutilization).

Menurut Hidayat (1982, hal. 23) untuk kondisi tenaga kerja kita, pilihan teknologi hendaknya disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas sumber daya yang ada dan bukan sebaliknya (the kind of technology chosen must be dictated by the quality of the human resources available not the choice of technology be will be dictated by the owners of production). Pada tabel 3,4 dapat dilihat besarnya pengangguran di Indonesia menurut tingkat

pendidikan serta relevansi pekerjaan tamatan perguruan tinggi sebagaimana dikemukakan oleh Arndt dan Sundrum serta Palmier (Sumarno, 1986, hal.5 dan 6)

Tabel 3. Pengangguran di Indonesia menurut lokasi dan tingkat pendidikannya (%)

Tabel 3.

Pengangguran di Indonesia menurut lokasi dan tingkat pendidikannya (%)

| Pendidikan | Kota | | | Desa | | | Total |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | Pria | Wnt. | Tot. | Pria | Wnt. | Tot. | |
| 1. S.D. atau kurang | 15,6 | 9,0 | 12,3 | 4,6 | 3,8 | 4,2 | 8,25 |
| 2. Sek. Menengah | 18,2 | 24,4 | 21,3 | 12,9 | 17,0 | 14,9 | 18,13 |
| 3. Di atas Sek. Menengah | 5,6 | 16,4 | 11,0 | 16,6 | 3,2 | 9,9 | 10,45 |

Sumber : Arndt dan Sundrum (1980 : 167.)

Tabel 3. menunjukkan bahwa secara keseluruhan persentase lulusan/tamatan perguruan tinggi yang menganggur lebih rendah dari kelompok tamatan sekolah menengah, tetapi lebih tinggi dari kelompok yang hanya berpendidikan rendah. Data tersebut juga menunjukkan adanya perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di kota, persentase wanita tamatan perguruan tinggi yang menganggur jauh lebih tinggi dari pada pria. Di desa, persentase pria penganggur tamatan perguruan tinggi lebih tinggi dari pada kelompok wanitanya. Keadaan tersebut mungkin karena di desa relatif sedikit wanita berpendidikan tinggi di kota banyak wanita berpendidikan tinggi yang tidak bekerja, meskipun relatif lebih banyak pekerjaan yang sesuai dengan taraf pendidikan mereka.

Bentuk lain dari pemborosan modal yang ditanamkan di pendidikan tinggi ialah tamatan tersebut bekerja, tetapi tidak sesuai dengan pendidikannya. Mungkin bidangnya yang kurang sesuai, dan mungkin pula pekerjaan tertentu sebenarnya hanya memerlukan tingkat pendidikan menengah.

Masalah relevansi okupasi para tamatan perguruan tinggi di Indonesia pernah di kaji oleh Palmier (1982 : 697, 704)

Tabel 4 : Relevansi Okupasi para tamatan perguruan tinggi (%)

| Bidang studi : | persen dr. popl. | OKUPASI RELEVAN. Sarjud. Sarju. X | | | OKUPASI TIDAK RELEVAN |
|--|------------------|-----------------------------------|----|----|-----------------------|
| 1. Pertanian | 3 | 46 | 28 | 37 | 63 |
| 2. Teknik | 10 | 46 | 44 | 45 | 55 |
| 3. Komunikasi | 5 | 20 | 26 | 23 | 77 |
| 4. Kesehatan | 6 | 78 | 56 | 67 | 33 |
| 5. Pendidikan/Keguruan | 30 | 69 | 70 | 70 | 30 |
| 6. Lain-lain (Hukum, Seni, Sains, Ilmu Sosial) | 39 | 35 | 29 | 32 | 68 |
| 7. Tak diketahui | 7 | | | | |
| Rata-rata | 100 | 49 | 42 | 46 | 54 |

Sumber : Palmier (1982 : 697, 704)

Tabel.4 secara terperinci menunjukkan bahwa sarjana dan sarjana muda dari bidang pendidikan/keguruan dan kesehatanlah persentasenya paling tinggi dengan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat/jenis bidang keahliannya. Dari bidang studi yang lain, lebih dari separoh pekerjaannya tidak/kurang relevan. Dikemukakan bahwa hanya 46 persen tamatan perguruan tinggi di Indonesia bekerja pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya; sedangkan sebanyak 54 persen lainnya memiliki pekerjaan yang tidak atau kurang sesuai dengan keahliannya. Kelompok terakhir inilah yang mengalami underemployment, sedikit lebih baik dari pada unempolyment.

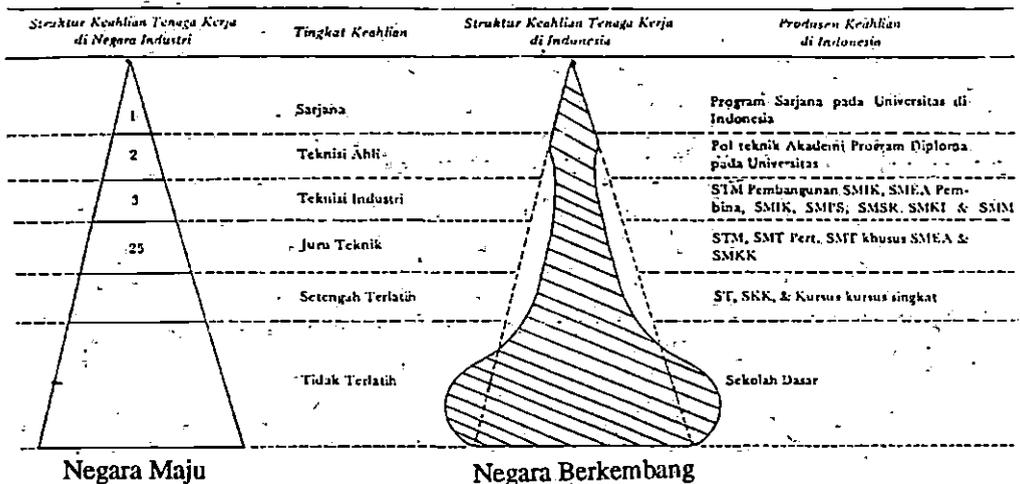
Kecenderungan perubahan teknologi akan terjadi apabila terjadi pergeseran struktur produksi. Secara terencana pemerintah melalui Repelita telah melakukan pergeseran struktur produksi dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan dan pada tahap tinggal landas perubahan menuju ke masyarakat industri. Daya tampung sektor pertanian semakin menurun sementara sektor industri penghasil barang modal dan eksporsifatnya semakin relatif padat modal dan padat teknologi sehingga jumlah pengangguran

akan tetap besar. Pada Repelita V diperkirakan output nasional tumbuh sekitar 5 persen setiap tahun akan tetapi kesempatan kerja yang diciptakan hanya tumbuh sekitar 2,5 persen. Akibatnya pengangguran akan meningkat jumlahnya (Soelistyo 1988, hal. 10).

Perubahan struktur ekonomi dari negara agraris menjadi negara industri mengakibatkan perubahan dalam bidang keahlian tenaga kerja yang berbeda dengan keahlian buruh tani. Tenaga profesional, teknisi ahli (higher technician), teknisi industri (trade technician) dan juru teknik (tradesman) diperlukan dalam jumlah yang lebih besar. Dilihat dari struktur keahlian yang dimiliki tenaga kerja Indonesia masih terdapat kekurangan yang cukup besar ; tenaga profesional masih kurang dibandingkan dengan permintaan sektor industri sehingga banyak digunakan tenaga

asing; sarjana teknik Indonesia masih belum masuk kategori manusia terampil dibandingkan dengan Jepang, Korea, dan Taiwan; teknisi ahli, teknisi industri dan juru teknik tidak tersedia dan terlalu besar hasrat untuk masuk perguruan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa hambatan utama pembangunan industri dalam dasa warsa 80-an terletak pada langkanya mutu tenaga kerja yang diperlukan di lapangan. Ini berarti pula dunia pendidikan kurang responsif dalam menyediakan "high level manpower" yang diperlukan untuk pembangunan sekarang dan di masa mendatang (Hidayat, 1982, hal 25). Pada gambar 1a 1b dapat dilihat bentuk piramida struktur jenjang tenaga kerja di Indonesia yaitu mengalami penyempitan di bagian tanah yang berarti kurangnya tenaga teknisi ahli dan tenaga teknis dengan akibat produktivitas menjadi rendah

Gambar : 1a. Perbandingan Struktur Keahlian Tenaga Kerja di Negara Industri dan Indonesia



Sumber : PRISMA 4, April 1982

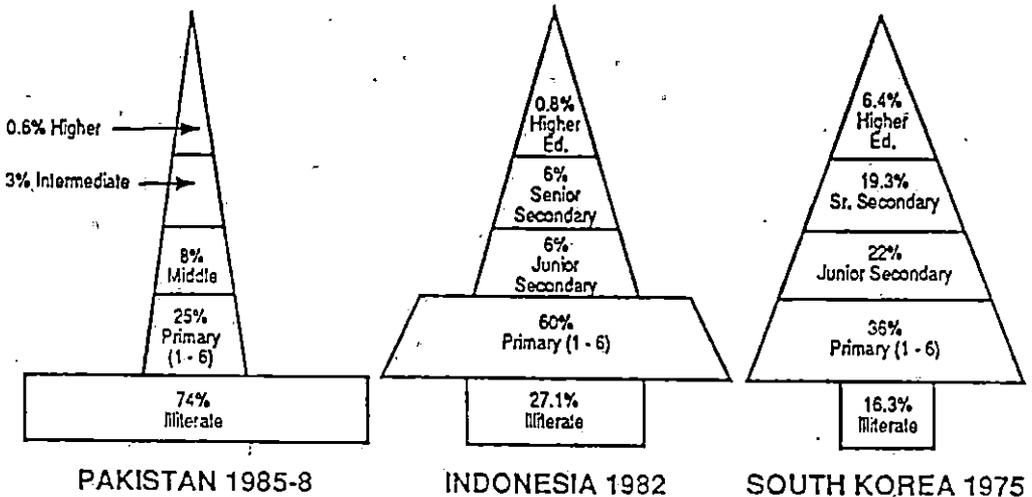
Sistem Pendidikan

Tujuan pendidikan nasional untuk meningkatkan ketaqwaan, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, kepribadian, cinta tanah air dan mampu membangun dirinya sendiri serta pembangunan bangsa serta perluasan memperoleh pendidikan sekaligus mengarahkan pada kebutuhan pembangunan di berbagai bidang serta bahwa pendidikan adalah berlasung seumur hidup serta dilaksanakan dalam lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat merupakan kebijaksanaan yang cukup tepat dan mendukung terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Namun demikian dalam pelaksanaan terdapat berbagai variabel yang berpengaruh, kendala serta penyimpangan-penyimpangan seperti kendala budaya masyarakat, sistem

pendidikan dan sistem kepegawaian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini.

Semakin tersedia kesempatan memasuki pekerjaan sektor formal, semakin mendorong orang untuk memperoleh pendidikan (ijazah, diploma) yang lebih tinggi. Jumlah pelamar yang melebihi lowongan yang tersedia, pengembangan karier/promosi yang lebih cepat bagi lulusan sarjana di atas lulusan SLA memacu orang mencari persyaratan lain di atas persyaratan minimal dengan mengikuti pendidikan tambahan yang lebih tinggi. Sebagai akibat tidak tertampungnya para lulusan SLP/SLA pada tingkat pendidikan Universitas telah banyak berdiri perguruan tinggi swasta atau sekolah-sekolah swasta yang hanya menyebabkan semakin bertumpuknya jumlah penganggur.

Gambar 1b : Perbandingan Struktur Keahlian Tenaga Kerja Di Indonesia, Pakistan dan Korea.



Sumber : Depdikbud - USAID, Education and the Economy, 1992 hal 14.

Dalam sistem pendidikan kita jumlah SLA Umum yang lebih banyak dari SLA kejuruan, sistem seleksi untuk memasuki perguruan tinggi yang lebih menguntungkan lulusan SLA Umum, perluasan program studi (SO, S2, S3, D1, D4 dst), memberikan kontribusi pula bagi membengkaknya jumlah mahasiswa dan lulusan sarjana.

Sistem kepegawaian untuk seumur hidup (sampai usia pensiun) dan tidak berorientasi pada tingkat ketrampilan, maka pendidikan dianggap sebagai suatu cara untuk meningkatkan gengsi seseorang dalam masyarakat dan semakin menambah sulit dalam penataan sistem pendidikan yang ada (Soemarno, 1986, hal 12,13) Sementara Soelistyo (1988, hal. 14) menilai bahwa kebijaksanaan yang mendorong peningkatan jumlah serta kualitas pendidikan formal tidak diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi yang diciptakan oleh kondisi ekonomi yang semakin berkembang. Di sisi lain tantangan kemajuan IPTEK dari dunia barat semakin memaksa lembaga-lembaga pendidikan untuk mampu memberikan respon kreatif untuk mengangkat kehidupan bangsa sejajar dengan negara-negara maju. Sistem pendidikan harus mampu mempersiapkan bangsa untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin kompleks, memiliki sikap terbuka, percaya pada diri sendiri, berani mengambil resiko, bertanggung jawab, hidup sederhana dan bersikap produktif (Soedjatmoko, 1989, hal. 9)

Sementara itu jika kita tengok sistem pendidikan barat khususnya di Amerika menyertai percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 50 dan 60 an memperlihatkan dengan jelas kebijaksanaan

dan pengembangan pendidikan yang diarahkan pada perkembangan ekonomi. Konsep "Human Capital", teori modernisasi serta masa depan perkembangan masyarakat post industri memberikan arah dan penetapan policy pemerintah Amerika. Kombinasi prospektif ekonomi dalam pendidikan sebagai human investment merupakan bahan utama penyusunan kebijaksanaan pemerintah federal dalam pengembangan pendidikan umum yang relevan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Kompetisi serta timbulnya berbagai kelompok sosial untuk mengembangkan secara efektif human resources. Rakyat Amerika percaya bahwa tujuan pendidikan harus berkorelasi secara sistematis dengan proses pembangunan ekonomi sekalipun harus dibayar dengan mahal dari sisi politik dan sosial. Terlepas dari kelemahan-kelemahan serta kritik terhadap pendekatan human capital dalam pendidikan para pemegang policy di Amerika yakin bahwa reformasi pendidikan yang berpijak pada semboyan: "Pendidikan Untuk Pembangunan Ekonomi Negeri" merupakan sesuatu yang benar dan efisien dan akan mendapatkan hasil yang sejalan dengan pandangan tentang bagaimana sebaiknya pendidikan diwujudkan serta apa yang sebaiknya diajarkan (Alan J. De Young, 1989)

Berbicara tentang kebijaksanaan serta arah pendidikan di negeri kita Indonesia dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Konsep pembangunan Barat yang menekankan pada peningkatan GNP setinggi-tingginya dan secepat-cepatnya tidak mampu memecahkan masalah-masalah kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan di negara-negara

berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu strategi pembangunan yang bersendi pada pemerataan, kesempatan kerja, memberantas kemiskinan, kebodohan keterbelakangan adalah penting di samping meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan akan tetapi tanpa harus mengorbankan sumber daya yang besar yang kita miliki. Masalahnya ialah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pendayagunaan lebih efektif lagi variabel yang paling banyak kita miliki yaitu sumber daya manusia dikaitkan dengan alternatif pemilihan teknologi serta berbagai kelembagaan yang menunjang proses pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan jangan sampai melenyapkan kebudayaan yang sudah mendarah daging dalam masyarakat atau pendekatan yang bersifat manusiawi. Strategi pembangunan jangka panjang melalui struktur ekonomi yang seimbang yaitu kekuatan industri yang maju didukung kekuatan dan kemampuan pertanian yang tangguh serta perdagangan luar negeri yang sejalan dengan pembangunan industri dan pertanian adalah cukup ideal walaupun sulit dalam pelaksanaan.
3. Agar dapat menunjang pembangunan, perlu dilakukan pergeseran fungsi pendidikan dari fungsi tradisional yang berupa estafeta nilai-nilai (budaya) menjadi berorientasi ke depan yaitu berupaya mempersiapkan terbentuknya manusia yang mampu mengisi tenaga kerja masyarakat industri (manusia produktif) serta pengembangan nilai-nilai yang mendukung pembangunan.

Dalam bidang nonekonomik pendidikan berperan dalam mempersiapkan kondisi sikap mental dan orientasi yang lebih modern, memiliki disiplin nasional (kepatuhan, loyalitas) serta integritas nasional. Sikap yang positif dan aktif (optimistik), kepuasan atas pekerjaan dan mutu yang dihasilkan (commitment to work), berorientasi ke masa depan (futurism), berencana dan hemat, menghargai waktu (valuation on time), kompetisi yang sehat, dsb.

4. Perencanaan ketenaga kerjaan perlu memperhatikan keterkaitan antara pendidikan dan kesempatan kerja. Tujuan pendidikan selain meningkatkan pengetahuan perlu dikaitkan dengan kebijaksanaan kesempatan kerja. Demikian pula dalam membicarakan kesempatan kerja harus dikaitkan dengan peningkatan pendidikan tenaga kerja. Peran pendidikan yang lebih tepat adalah menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum di bidangnya sehingga lebih adaptif terhadap perkembangan spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan di dunia industri. Sementara untuk pembekalan keterampilan khusus yang diperlukan lebih mudah dan murah jika diselenggarakan melalui "on the job training" pada pusat-pusat industri yang bersangkutan. Sekolah-sekolah kejuruan dibatasi sesuai dengan kebutuhan mendesak. Sekolah-sekolah umum selain lebih efisien juga lebih fleksibel dan dirasakan lebih demokratis.
5. Sudah saatnya dirintis sistem rekrutmen tenaga kerja lebih mengutamakan unsur kompetensi, kemampuan dalam bidangnya dan tidak

semata-mata berdasarkan ijazah ataupun diploma. Praktek-praktek rekrutmen tenaga kerja melalui sistem koneksi, keluarga, sogok pada akhirnya akan merugikan orang lain dan lembaga itu sendiri. Sejak dini perlu ditanamkan pengetahuan tentang dunia kerja, disiplin kerja dan mengurangi ethos "menjadi pegawai negeri lebih terhormat" dari orang-orang yang bekerja wiraswasta. Penanaman disiplin dan integritas dapat dilakukan melalui pemahaman serta penghayatan nilai-nilai moral dan agama.

Pendidikan Islam

Seperti lembaga pendidikan umum yang lain, lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada tantangan pasaran tenaga kerja yang menurut adanya usaha pembaharuan sistem pendidikan Islam serta sistem pengelolaannya. Pemerintah bersama-sama masyarakat telah berusaha untuk mendorong lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan sistem pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan sinkron dan sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah melalui Undang-undang pendidikan Nasional (UU No. 2 Tahun 1989) serta berbagai Peraturan Pemerintah yang mengatur pendidikan pada tingkat prasekolah (PP No. 27 Tahun 1990), pendidikan Dasar (PP No. 28 Tahun 1990), Pendidikan Menengah (PP No. 29 Tahun 1990) serta pendidikan Tinggi (PP No. 30 Tahun 1990).

Pondok pesantren sebagai lembaga keagamaan di mana dikembangkan dan diajarkan ilmu Agama Islam dalam bentuknya yang lebih tradisional serta madrasah-madrasah dimana diajarkan ilmu

Agama Islam dengan sistem yang lebih modern (klassikal) berdasar SKB tiga menteri yaitu Menteri Agama, Mendikbud dan Mendagri dihadapkan pada keharusan memasukkan pengajaran ilmu pengetahuan umum dan keterampilan dalam kurikulumnya. Hal tersebut diperlukan agar setiap lulusan pesantren dan madrasah memiliki kemampuan untuk terjun ke dalam masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain hal tersebut perlu untuk meningkatkan daya saing pesantren serta madrasah terhadap pendidikan umum mengingat kecenderungan masyarakat semakin meningkat untuk memilih pendidikan umum yang secara langsung dapat menciptakan tenaga kerja yang siap pakai di pasaran kerja lebih-lebih pada saat memasuki masyarakat industri pada Pelita ke enam mendatang.

Berkaitan dengan arus perubahan sosial memasuki era industrialisasi mendatang maka menurut Prof. Dr. Mukti Ali (1984:16) maka sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang paling baik di Indonesia adalah sistem pendidikan mengikuti pola pondok pesantren, sedangkan sistem pengajaran mengikuti sistem pendidikan madrasah. Akan tetapi dengan menekankan sistem pendidikan modern dalam mengembangkan pendidikan Islam telah dirasakan kelemahannya yaitu timbulnya "krisis ulama" yang mendorong Menteri Agama untuk membentuk suatu usaha mencetak ulama melalui MAN Program Khusus yang sampai saat ini telah ada di 5 kota di Indonesia. Permasalahan lain mengenai pondok pesantren seperti dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid (1983:12) adalah integrasi produk pesantren

ke dalam sistem pendidikan nasional, masalah wawasan sosial budaya dan sosial ekonomi, kerjasama dengan pihak-pihak lain, hubungan antara keimanan dengan ilmu pengetahuan dan yang tidak kalah penting adalah masalah manajemen dan pembiayaan.

Mengenai pendidikan tinggi, IAIN khususnya tidak lepas dari permasalahan yang sama yaitu menurunnya animo masyarakat untuk masuk ke IAIN, masalah mutu akademis, kesempatan/lapangan kerja bagi para lulusan, relevansi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, serta masalah manajemen dan pembiayaan. Sementara itu Perguruan Tinggi (Islam) Umum di samping dihadapkan pada masalah manajemen, sumber daya manusia, dan juga dihadapkan pada masalah integrasi antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan Islam dalam berbagai disiplin ilmu yang dikembangkan pada perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu rekonstruksi sistem pendidikan Islam secara terus menerus sejalan dengan tantangan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lembaga-lembaga pendidikan Islam sudah seharusnya mempertahankan ciri utama pendidikannya berdasar pada prinsip-prinsip pendidikan Islam akan tetapi dituntut pula kemampuannya untuk menjawab tantangan-tantangan perkem-

bangsan masyarakat, ilmu pengetahuan serta teknologi dengan mengembangkan sistem pendidikan yang dilaksanakan sejalan dengan perubahan-perubahan tersebut demi kelangsungan eksistensi pendidikan Islam itu sendiri.

DAFTAR BACAAN

- Alan J De Young, *economics And American Education*, Longman Group Ltd, London, 1989.
- Departemen Kebudayaan RI dan USAID, *Education and The Economy, The External Efficiency of Education*, Jakarta, 1992.
- Amien Rais, M. (ED), *Islam di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Muljani A. Nurhadi, *Pendidikan dan Pembangunan Era Industrialisasi*, IKIP Muhammadiyah Yogyakarta, Nopember 1988.
- Prijono Tjiptoherijanto, *Masalah Ketenagakerjaan di Indonesia*, International Energy Seminar, Semarang, 27 Juli 1988.
- Sulistyo, MBA, *Strategi Pendidikan Nasional dalam Rangka Tinggal Landas*, Seminar ISPI, DIY, 24 Februari 1988.
- Sumarno, *Kaitan Kebutuhan Masyarakat akan Pendidikan Tinggi dengan Pembangunan Nasional*, FIP IKIP Yogyakarta, 19 Juli 1986.
- Yudo Swasono, *Perencanaan Tenaga Kerja di Indonesia*, Majalah Prisma 4 April 1982.